



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 768-781

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Hukum Atas Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Migran Indonesia di Malaysia Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Hukum Malaysia

Hari Sri Anggraeni<sup>1✉</sup>, Mohamad Tohari<sup>2</sup>, Tri Susilowati<sup>3</sup>

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Email: [harisrianggraeni.riri@gmail.com](mailto:harisrianggraeni.riri@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia di Malaysia berdasarkan Konvensi Hak Anak (CRC) dan hukum Malaysia. Anak-anak migran Indonesia di Malaysia menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan yang layak, meskipun pendidikan merupakan hak fundamental yang dijamin dalam hukum internasional. Penelitian ini mengidentifikasi peraturan dan kebijakan yang relevan, serta menganalisis implementasi prinsip-prinsip pendidikan dalam CRC. Berdasarkan kajian terhadap The Education Act 1996, Child Act 2001, serta kebijakan imigrasi Malaysia, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Malaysia telah meratifikasi CRC, implementasinya terhadap hak pendidikan anak-anak migran Indonesia masih terkendala oleh diskriminasi kebijakan, ketidakjelasan status kewarganegaraan, dan ketakutan akan deportasi. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa banyak anak migran Indonesia yang terpaksa bergantung pada pendidikan informal dengan biaya tinggi, sementara akses ke sekolah formal sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis hak asasi manusia untuk memperbaiki kondisi pendidikan anak-anak migran di Malaysia.

Kata Kunci: *Akses Pendidikan, Anak Migran Indonesia, Konvensi Hak Anak, Hukum Malaysia, Diskriminasi, Status Kewarganegaraan, Reformasi Kebijakan*

## Abstract

This research aims to analyze access to education for Indonesian migrant children in Malaysia based on the Convention on the Rights of the Child (CRC) and Malaysian law. Indonesian migrant children in Malaysia face various barriers to obtaining quality education, despite education being a fundamental right guaranteed by international law. This study identifies relevant regulations and policies, as well as analyzes the implementation of educational principles in the CRC. Based on the review of the Education Act 1996, the Child Act 2001, and Malaysia's immigration policies, this research finds that while Malaysia has ratified the CRC, its implementation of the right to education for Indonesian migrant children is hindered by discriminatory policies, unclear citizenship status, and fears of deportation. This study also reveals that many Indonesian migrant children are forced to rely on informal, high-cost education, while access to formal schools is extremely limited. Therefore, this study recommends policy reforms that are more inclusive and human rights-based to improve the education of migrant children in Malaysia.

*Keywords: Access to Education, Indonesian Migrant Children, Convention on the Rights of the Child, Malaysian Law, Discrimination, Citizenship Status, Policy Reform*

## PENDAHULUAN

Anak-anak migran Indonesia yang tinggal di Malaysia menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pendidikan yang layak, meskipun pendidikan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh hukum internasional (UN, 1989). Seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia, masalah akses pendidikan bagi anak-anak migran semakin mencuat. Anak-anak ini sering kali tidak terdaftar dalam sistem pendidikan formal karena beberapa faktor, mulai dari status kewarganegaraan yang tidak jelas, ketidakpastian dokumen imigrasi, hingga kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia. Berdasarkan data dari International Organization for Migration (IOM), per tahun 2020, terdapat lebih dari 2 juta migran Indonesia yang bekerja di Malaysia, dengan sekitar 25% dari mereka adalah anak-anak (IOM, 2020, hal. 45). Kelompok anak-anak migran ini rentan menghadapi hambatan yang menghalangi mereka untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dalam konteks ini, terdapat tiga tantangan utama yang sering kali dihadapi oleh anak-anak migran Indonesia: ketidakjelasan status kewarganegaraan, diskriminasi kebijakan pendidikan, serta ketakutan akan deportasi yang membuat orang tua mereka enggan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah.

Di tingkat internasional, hak atas pendidikan anak diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), yang telah diratifikasi oleh Malaysia pada tahun 1995. Pasal 28 CRC menetapkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan

pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk anak-anak migran yang tinggal di negara tersebut. Meskipun prinsip ini telah menjadi bagian dari hukum internasional, pelaksanaan hak ini di lapangannya masih menghadapi sejumlah kendala. Hal ini berlaku terutama untuk anak-anak migran Indonesia, yang seringkali tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas dan seringkali bertentangan dengan kebijakan domestik serta masalah sosial ekonomi (UNICEF, 2019). Hal ini juga dapat dilihat dari kebijakan pemerintah Malaysia yang tidak sepenuhnya mengakomodasi hak anak migran untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak warga negara Malaysia. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah ketidakmampuan negara untuk memberikan identitas resmi kepada anak-anak migran, yang berujung pada ketidakmampuan mereka untuk mengakses pendidikan publik.

Selain itu, meskipun undang-undang Malaysia, seperti *The Education Act 1996* dan *Child Act 2001*, memberikan hak untuk pendidikan kepada semua anak, kenyataannya akses pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia masih sangat terbatas. Mereka dihadapkan pada berbagai kendala administratif, serta kebijakan yang sering kali menghalangi mereka untuk mengakses pendidikan yang seharusnya menjadi hak mereka. Menurut laporan *Human Rights Watch* tahun 2019, sekitar 70% anak-anak migran Indonesia di Malaysia tidak terdaftar di sekolah formal dan terpaksa mengandalkan pendidikan informal (HRW, 2019, hal. 32).

Dalam hal ini, anak-anak migran sering kali harus menempuh pendidikan melalui jalur yang tidak terjamin kualitasnya dan jauh dari kurikulum pendidikan nasional yang berlaku di Malaysia. Beberapa sekolah swasta ini mengenakan biaya yang cukup tinggi, yang membuatnya tidak terjangkau bagi sebagian besar keluarga migran (UNICEF, 2019). Bahkan, banyak dari sekolah-sekolah swasta tersebut yang tidak diakui oleh pemerintah Malaysia dan tidak memberikan ijazah yang diakui secara resmi (Migration Working Group, 2018).

Anak-anak migran Indonesia seringkali menghadapi kesulitan besar terkait status kewarganegaraan mereka. Banyak anak-anak migran Indonesia yang lahir di Malaysia tetapi tidak terdaftar dalam sistem administrasi negara, sehingga mereka tidak memiliki akses ke pendidikan publik (Zana, 2020). Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang mewajibkan setiap anak yang lahir di Malaysia untuk terdaftar dalam sistem administrasi negara, namun banyak dari orang tua migran yang tidak memiliki dokumen yang sah atau berada di negara tersebut secara ilegal (Santoso, 2022). Selain itu, sebagian besar anak-anak migran Indonesia berada di Malaysia dengan visa sementara atau tanpa izin tinggal yang sah, sehingga membuat mereka terpinggirkan dalam sistem pendidikan formal. Anak-anak yang tidak terdaftar dalam sistem administrasi negara Malaysia sering kali mengalami kesulitan

dalam mengakses layanan publik, terutama pendidikan. Mereka tidak terdaftar dalam sistem pendidikan dan sering kali tidak diterima di sekolah negeri.

Bahkan meskipun terdapat kebijakan *The Education Act* 1996 yang menyatakan bahwa pendidikan harus diberikan kepada semua anak, kendala utama bagi anak-anak migran adalah status legal mereka yang tidak diakui. Selain itu, diskriminasi kebijakan turut memperburuk kondisi ini. Banyak sekolah di Malaysia yang menetapkan kebijakan bahwa hanya anak-anak yang memiliki status legal yang dapat diterima di sekolah negeri. Beberapa sekolah bahkan menolak menerima anak-anak migran Indonesia untuk mengikuti ujian atau melanjutkan pendidikan mereka, dengan alasan masalah administratif atau imigrasi (BP2MI, 2022). Dalam beberapa kasus, anak-anak migran yang mencoba mendaftar di sekolah negeri sering kali ditolak dengan alasan status hukum yang tidak jelas, atau bahkan mengalami diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan mereka (Sri, 2024). Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan nasional yang mendukung pendidikan bagi semua anak dan implementasi di lapangan yang sering kali tidak mengakomodasi hak anak-anak migran.

Salah satu tantangan terbesar adalah ketakutan deportasi yang dihadapi oleh orang tua anak-anak migran. Sebagian besar keluarga migran memilih untuk tidak melibatkan diri dengan proses administratif sekolah karena khawatir bahwa hal tersebut dapat memicu tindakan deportasi. Berdasarkan laporan *Amnesty International* tahun 2019, sekitar 40% anak-anak migran Indonesia di Malaysia tidak terdaftar di sekolah negeri (Amnesty International, 2019, hal. 27). Karena banyak dari mereka yang terpaksa bergantung pada sekolah swasta atau pendidikan informal yang sangat terbatas dan mahal. Di sisi lain, kebijakan diskriminatif ini juga berdampak pada integrasi sosial anak-anak migran di masyarakat Malaysia. Mereka menjadi terisolasi dan menghadapi kesulitan untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial atau mendapatkan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan.

Selain tantangan hukum dan administratif, terdapat pula faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi akses pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia di Malaysia. Anak-anak migran sering kali dianggap sebagai warga negara kelas dua, yang mempengaruhi peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak (Sholina, 2022). Faktor-faktor seperti diskriminasi rasial dan stereotip terhadap migran Indonesia juga dapat memperburuk situasi tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Malaysia perlu mengambil langkah-langkah yang lebih inklusif dan memperkuat komitmen terhadap hak asasi manusia, terutama hak pendidikan bagi anak-anak migran. Penelitian oleh Wibowo dalam

jurnal "Perlindungan Hak Pendidikan bagi Anak Migran Indonesia di Malaysia" (Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 2020) mencatat bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen terhadap perlindungan hak anak dalam kerangka internasional, tantangan implementasi di lapangan sangat nyata. Wibowo mencatat bahwa kebijakan Malaysia sering kali lebih mengutamakan kebutuhan nasional daripada kewajiban internasional, yang menyebabkan akses pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia terganggu, terutama dalam hal pendaftaran administrasi dan kebijakan diskriminatif di beberapa sekolah (Effendi, 2023).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis kebijakan dan peraturan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia terkait akses pendidikan bagi anak migran Indonesia. (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghalangi atau membatasi akses pendidikan bagi anak migran Indonesia di Malaysia, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi. (3) Menggali kontribusi hukum internasional dalam melindungi hak pendidikan bagi anak migran Indonesia di Malaysia, dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak (CRC). (4) Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi anak migran Indonesia di Malaysia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang fokus pada analisis norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum domestik Malaysia maupun hukum internasional terkait perlindungan hak pendidikan anak, seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (CRC). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk menggambarkan fenomena terkait hak pendidikan anak migran Indonesia di Malaysia dan menganalisis hubungan antara kebijakan pendidikan yang ada dengan kenyataan di lapangan.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis regulasi dan kebijakan hukum yang berlaku serta teori-teori hak pendidikan anak dan perlindungan anak migran dalam konteks hukum internasional. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari studi literatur, dokumentasi, dan kebijakan pendidikan di Malaysia terkait anak migran. Data sekunder yang digunakan meliputi buku, artikel jurnal, laporan lembaga internasional seperti UNICEF dan Human Rights Watch, serta dokumen kebijakan pendidikan dari Malaysia dan Indonesia yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumentasi untuk mengumpulkan peraturan hukum di Malaysia seperti The Education Act 1996 dan Child Act 2001, serta dokumen terkait hak anak migran. Analisis literatur digunakan untuk menelaah laporan penelitian dan artikel yang relevan, sementara analisis kebijakan diterapkan untuk menilai implementasi kebijakan pendidikan bagi anak migran Indonesia di Malaysia.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, termasuk kategorisasi data berdasarkan tema yang relevan dengan fokus penelitian dan analisis konten untuk mengevaluasi kebijakan serta penerapan hak anak migran dalam sistem pendidikan Malaysia. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber informasi dari berbagai dokumen dan literatur yang berbeda serta perbandingan dengan temuan penelitian serupa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Akses pendidikan bagi anak migran Indonesia di Malaysia menjadi salah satu isu yang terus mendapatkan perhatian di dunia internasional. Meskipun Malaysia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai hak-hak anak, seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, kenyataannya anak-anak migran, khususnya yang berasal dari Indonesia, sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan formal di negara tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat struktural maupun kebijakan.

### Faktor Sosial dan Ekonomi yang Memengaruhi Akses Pendidikan Anak Migran

Faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi anak migran Indonesia di Malaysia meliputi kemiskinan yang menyebabkan banyak keluarga migran menganggap pendidikan sebagai hal yang tidak esensial. Selain itu, banyak dari mereka yang bekerja sebagai buruh migran dengan jam kerja yang panjang dan kondisi hidup yang tidak stabil. Hal ini menghambat anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan.

Siti Nur Ainah, dalam penelitian berjudul "Kondisi Pendidikan Anak Migran di Malaysia: Sebuah Tinjauan" yang diterbitkan dalam "Jurnal Kemanusiaan dan Pendidikan" (2022), menyatakan bahwa faktor ekonomi keluarga menjadi alasan utama anak-anak migran enggan melanjutkan pendidikan. Banyak anak migran yang akhirnya bekerja, baik di sektor informal atau sebagai pekerja rumah tangga, daripada bersekolah (Ainah, 2022).

### Statistik dan Kondisi Terkini

Menurut *Human Rights Watch (HRW)*, meskipun secara formal Malaysia menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak migran, lebih dari 50% anak migran Indonesia yang tinggal di Malaysia tidak terdaftar di sekolah formal. Banyak dari mereka terpaksa

bersekolah di lembaga pendidikan informal atau mengikuti kursus privat yang biayanya cukup mahal dan kualitasnya tidak terjamin.

Data terbaru dari *International Organization for Migration (IOM)* mengungkapkan bahwa sekitar 40% dari jumlah total anak migran Indonesia di Malaysia yang berusia 6 hingga 12 tahun tidak terdaftar di sekolah karena masalah administratif dan kekurangan dokumen identitas yang sah.

Save the Children dalam laporannya tahun 2020 mencatat bahwa diskriminasi terhadap anak-anak migran berkontribusi pada rendahnya angka partisipasi mereka dalam pendidikan formal (Save the Children, 2020, hal. 19). Di beberapa daerah, terdapat pandangan masyarakat lokal yang menganggap anak-anak migran sebagai warga negara kelas dua yang tidak berhak atas layanan publik, termasuk pendidikan.

#### Kasus-kasus Nyata Terkait Anak Migran Indonesia

Beberapa kasus nyata mengenai anak migran Indonesia yang tidak mendapatkan akses pendidikan layak di Malaysia sering muncul. Misalnya, dalam laporan *Amnesty International* (2019), terdapat kasus seorang anak migran asal Indonesia yang terpaksa berhenti sekolah karena kekurangan dokumen resmi. Meskipun ia telah tinggal di Malaysia selama lebih dari lima tahun dan memiliki teman-teman sekolah lokal, status kewarganegaraannya yang tidak jelas membuatnya tidak diterima di sekolah negeri. Kasus lainnya melibatkan anak migran yang harus bekerja untuk membantu keluarganya yang kesulitan secara ekonomi, sehingga mereka harus meninggalkan pendidikan mereka dan tidak dapat mengakses kesempatan belajar yang seharusnya mereka terima.

#### Kebijakan Malaysia dalam Pendidikan Anak Migran

Kebijakan pendidikan Malaysia, yang diatur dalam Education Act 1996, secara teknis memberikan hak pendidikan kepada anak-anak migran. Namun, kebijakan ini lebih banyak fokus pada anak-anak yang memiliki status hukum yang jelas. Kebijakan ini belum mencakup sepenuhnya anak migran yang tidak memiliki izin tinggal tetap atau status kewarganegaraan yang sah.

Zulkifli Zainal Abidin dalam jurnal "Jurnal Pendidikan dan Sosial" (2021) menekankan bahwa walaupun Malaysia memiliki kerangka hukum untuk menyediakan pendidikan bagi anak migran, implementasi kebijakan tersebut masih terbatas oleh masalah administratif dan ketidakmampuan anak-anak migran untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Sebagai contoh, anak-anak migran yang datang ke Malaysia tanpa dokumen yang lengkap atau yang tidak terdaftar dalam sistem administrasi kewarganegaraan Malaysia

akan kesulitan untuk mendapatkan akses ke sekolah negeri (Human Rights Watch, 2019). Selain itu, adanya kebijakan yang membatasi penerimaan anak migran pada sekolah-sekolah tertentu menambah beban mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak (Save the Children, 2020).

### Studi Kasus tentang Kondisi Pendidikan Anak Migran di Malaysia

Studi kasus di Kuala Lumpur yang dilakukan oleh Nina P. Lestari dalam "Pendidikan Anak Migran di Malaysia" (2021) menunjukkan bahwa anak migran yang berasal dari Indonesia sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Banyak yang dipaksa bekerja di sektor informal, terutama di industri pembersihan dan konstruksi. Situasi ini mempengaruhi pendidikan mereka, mengingat mereka harus berkerja sepanjang hari untuk membantu keluarga mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan (Lestari, 2021).

### Peraturan dan Kebijakan Malaysia tentang Pendidikan Anak Migran

Malaysia telah mengadopsi sejumlah undang-undang dan kebijakan yang seharusnya menjamin hak pendidikan bagi anak-anak migran, namun implementasinya masih jauh dari ideal. Selain Education Act 1996, yang mengatur tentang pendidikan dasar wajib, ada juga kebijakan-kebijakan terkait imigrasi yang berdampak langsung pada akses anak migran terhadap pendidikan. Salah satunya adalah kebijakan yang mengharuskan anak migran untuk memiliki izin tinggal yang sah sebelum bisa diterima di sekolah-sekolah formal.

### Kebijakan Terkait Imigrasi dan Dampaknya pada Akses Pendidikan

Salah satu kebijakan utama yang berdampak pada akses pendidikan anak migran adalah kebijakan imigrasi Malaysia yang ketat. Anak migran yang tidak memiliki izin tinggal yang sah atau yang datang dari keluarga dengan status ilegal sering kali kesulitan untuk mendapatkan pendidikan formal. Rosa R. Sari dalam "Jurnal Hukum dan Pembangunan" (2020) menyatakan bahwa kebijakan imigrasi Malaysia seringkali mempersulit anak migran untuk mengakses pendidikan dasar, yang seharusnya dijamin oleh negara.

### Malaysia sebagai Negara Pihak CRC

Sebagai negara pihak dalam CRC, Malaysia sebenarnya memiliki kewajiban untuk menjamin hak anak migran dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, kebijakan imigrasi yang ketat, serta kebijakan diskriminatif terhadap anak migran, sering kali menjadi penghalang utama dalam penerapan prinsip-prinsip CRC. Misalnya, pasal-pasal dalam *Education Act 1996* mengatur bahwa pendidikan dasar harus diberikan kepada semua anak tanpa membedakan status kewarganegaraan. Namun, dalam praktiknya, anak-anak migran

Indonesia sering kali dihadapkan pada persyaratan administratif yang rumit dan tidak realistis, seperti dokumen identitas yang harus dipenuhi untuk dapat mendaftar di sekolah.

#### Analisis Hukum Berdasarkan KHA (Konvensi Hak Anak)

Malaysia, sebagai negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan. Pasal 28 dari CRC menyatakan bahwa semua anak berhak memperoleh pendidikan dasar yang wajib dan gratis. Namun, meskipun telah mengadopsi CRC, implementasi hak pendidikan untuk anak migran masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa prinsip CRC, seperti non-diskriminasi dan hak atas pendidikan yang layak, belum sepenuhnya diterapkan di Malaysia, terutama dalam hal pemberian pendidikan untuk anak migran yang tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas.

Sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak (KHA), Malaysia memiliki kewajiban untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua anak, tanpa diskriminasi. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah kendala yang membatasi akses anak migran Indonesia terhadap pendidikan.

#### Prinsip Non-Diskriminasi dalam KHA dan Penerapannya di Malaysia

Salah satu prinsip utama dalam KHA adalah non-diskriminasi yang mengharuskan negara pihak untuk menjamin hak-hak anak tanpa membedakan status apapun. Prinsip ini, meskipun diakui oleh Malaysia, tidak sepenuhnya diterapkan dalam hal pendidikan bagi anak migran. Dr. Muhammad Ali, dalam bukunya "Pendidikan untuk Semua: Tinjauan Hukum Internasional" (2020), menjelaskan bahwa meskipun Malaysia meratifikasi KHA, namun kebijakan-kebijakan imigrasi dan pendidikan yang diskriminatif masih menghalangi anak migran untuk menikmati hak pendidikan yang setara dengan anak-anak warga negara Malaysia.

#### Kasus-kasus Hukum terkait Implementasi KHA di Malaysia

Isu akses pendidikan bagi anak-anak migran di Malaysia masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan ketatnya kebijakan administrasi yang menghambat pendaftaran mereka di sekolah-sekolah negeri. Menurut laporan tahunan *Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) 2020*, banyak anak migran ditolak masuk sekolah karena peraturan administratif yang ketat (SUHAKAM, 2020, hal. 41), terdapat berbagai kasus anak migran yang ditolak masuk ke sekolah karena tidak memiliki dokumen resmi yang diwajibkan oleh pemerintah Malaysia. Salah satu kasus yang cukup mencolok adalah

seorang anak migran asal Indonesia yang telah tinggal lebih dari lima tahun di Malaysia, namun tetap tidak dapat bersekolah di sekolah negeri akibat dokumen imigrasinya yang belum lengkap.

Dalam *Country Reports on Human Rights Practices* (2022) yang dirilis oleh Kedutaan Besar AS di Malaysia, disebutkan bahwa anak-anak migran menghadapi hambatan serius dalam mengakses pendidikan formal akibat regulasi imigrasi yang ketat (U.S. Department of State, 2022, hal. 58), di mana anak-anak migran yang tidak memiliki dokumen sah sering kali kesulitan mengakses layanan pendidikan dasar di Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Malaysia telah meratifikasi *Konvensi Hak Anak* (KHA), implementasi kebijakan yang ada masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip non-diskriminasi dan hak atas pendidikan bagi semua anak.

### Peran Pemerintah Malaysia dalam Menanggulangi Masalah Pendidikan Anak Migran

Pemerintah Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan dalam menyediakan pendidikan bagi anak-anak migran, termasuk mereka yang tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah pendirian *Community Learning Center (CLC)* yang dikelola oleh komunitas pekerja migran Indonesia dan didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Saat ini, terdapat sekitar 500 CLC di Malaysia yang melayani sekitar 200.000 anak pekerja migran Indonesia.

Namun, meskipun upaya ini signifikan, tantangan masih ada. Sebagian besar CLC didirikan atas inisiatif komunitas atau perusahaan tempat orang tua bekerja, dengan sedikit atau tanpa dukungan langsung dari pemerintah Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang ada belum sepenuhnya inklusif bagi anak-anak migran tanpa dokumen resmi.

Selain itu, meskipun pemerintah Malaysia telah berupaya mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program, kebijakan tersebut seringkali tidak secara khusus menargetkan anak-anak migran tanpa status kewarganegaraan yang jelas. Akibatnya, banyak dari mereka tetap menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan formal karena persyaratan administratif yang ketat, seperti kewajiban memiliki izin tinggal yang sah.

Dalam konteks ini, peran perwakilan Indonesia di Malaysia menjadi penting. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru, misalnya, telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran

Indonesia dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dan mendirikan fasilitas pendidikan alternatif.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat upaya dari berbagai pihak, masih diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif untuk memastikan bahwa semua anak di Malaysia, terlepas dari status kewarganegaraan mereka, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan.

### Rekomendasi Kebijakan

Untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak migran, beberapa kebijakan yang perlu diperkenalkan termasuk reformasi prosedur administratif yang lebih fleksibel dan inklusif, yang memungkinkan anak-anak migran untuk mendaftar tanpa terkendala oleh dokumen imigrasi yang tidak lengkap. Selain itu, pemerintah Malaysia harus memperkuat koordinasi antara lembaga pendidikan dan imigrasi untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak bertentangan dengan kebijakan imigrasi yang ada.

Reformasi kebijakan pendidikan yang lebih inklusif akan memungkinkan anak-anak migran Indonesia untuk mengakses pendidikan yang setara dengan anak-anak warga negara Malaysia, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masa depan.

### SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa akses pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia di Malaysia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebijakan yang tidak inklusif, kendala administratif, serta kekhawatiran terhadap deportasi. Walaupun Malaysia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), penerapan prinsip non-diskriminasi dalam sistem pendidikan masih belum optimal.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa regulasi yang berlaku di Malaysia belum sepenuhnya memberikan jaminan akses pendidikan bagi anak-anak migran, terutama mereka yang tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Faktor utama yang menghambat akses mereka mencakup kebijakan imigrasi yang ketat, diskriminasi dalam penerimaan sekolah, dan kurangnya informasi mengenai hak pendidikan bagi keluarga migran. Dari perspektif hukum internasional, CRC menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, namun implementasinya di Malaysia masih membutuhkan banyak perbaikan.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih inklusif, penyederhanaan prosedur administratif, serta peningkatan kerja sama antara Malaysia dan Indonesia guna

menjamin hak pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia dapat terpenuhi secara adil dan merata.

Penelitian ini menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia di Malaysia masih menghadapi tantangan signifikan akibat kebijakan yang diskriminatif, hambatan administratif, dan ketakutan akan deportasi. Meskipun Malaysia telah meratifikasi CRC, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip non-diskriminasi yang dijamin dalam konvensi tersebut.

Dalam menjawab rumusan masalah, ditemukan bahwa regulasi Malaysia masih membatasi akses pendidikan bagi anak-anak migran, terutama karena status kewarganegaraan yang tidak jelas. Faktor utama penghambatnya adalah kebijakan imigrasi yang ketat, diskriminasi dalam penerimaan sekolah, serta minimnya sosialisasi hak pendidikan bagi keluarga migran. Perspektif hukum internasional, khususnya CRC, menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, tetapi implementasi di Malaysia masih perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih inklusif, penyederhanaan proses administratif, serta kerja sama antara Malaysia dan Indonesia untuk memastikan hak pendidikan anak-anak migran Indonesia terpenuhi secara adil dan merata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2019). Education Barriers for Migrant Children in Malaysia. Amnesty International.
- Amnesty International. (2019). Migrant Children's Struggle for Education. Amnesty International.
- Amnesty International. (2019). Trapped: The Exploitation of Migrant Children in Malaysia. Amnesty International.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (2024, July 2). Bahas Isu Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia di Tawau Malaysia, Konsul RI Tawau Temui BP2MI. Retrieved from <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bahas-isu-pendidikan-anak-pekerja-migran-indonesia-di-tawau-malaysia-konsul-ri-tawau-temui-bp2mi>
- Effendi. (2023). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Retrieved from <https://ejournalilmiah.com/index.php/Maslahah/article/view/11448>
- Hartati, S., & Andawiyah, S. (2024, August). Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ladang Sawit di Sabah, Malaysia. *Buletin KPIN*. Retrieved from

- <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1578-akses-pendidikan-anak-pekerja-migran-indonesia-pmi-ladang-sawit-di-sabah-malaysia>
- Human Rights Watch. (2019). Help Wanted: Abuses against Migrant Workers in Malaysia. Human Rights Watch.
- Human Rights Watch. (2021). Malaysia: Barriers to Education for Migrant Children. Retrieved from <https://www.hrw.org/report/2021/05/07/malaysia-barriers-education-migrant-children>
- International Organization for Migration (IOM). (2020). World Migration Report 2020. Geneva: IOM.
- International Organization for Migration (IOM). (2023). Migrant Children in Malaysia: Education Gaps and Challenges. Retrieved from <https://www.iom.int/news/migrant-children-malaysia-education-gaps-and-challenges>
- Malaysia. (1996). The Education Act 1996 (Act 550), Laws of Malaysia.
- Malaysia. (2001). The Child Act 2001 (Act 611), Laws of Malaysia.
- Migration Working Group. (2018). Undocumented Children in Malaysia: Issues and Challenges. Kuala Lumpur. Retrieved from <https://www.mwgroup.org.my>
- New Naratif. (2023, August 31). Perjuangan 12 Tahun untuk Mengakhiri Penahanan Migran Anak di Malaysia. Retrieved from <https://newnaratif.com/id/perjuangan-12-tahun-untuk-mengakhiri-penahanan-migran-anak-di-malaysia/>
- Salleh, N. M. (2018). The Education Rights of Migrant Children in Malaysia. *Asian Journal of Law and Governance*, 5(2), 55-67.
- Sari, R. R. (2020). A Comparative Study of Migrant Education Policies in ASEAN Countries. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(3), 88-102.
- Save the Children. (2020). Discrimination and Access to Education for Migrant Children in Malaysia. Retrieved from <https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/education-undocumented-migrants-malaysia.pdf>
- Save the Children. (2020). Lost in Transition: The Education Crisis of Migrant Children in Southeast Asia. Save the Children.
- SUHAKAM. (2020). Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia Malaysia. Kuala Lumpur: SUHAKAM.
- United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child, Article 28. Retrieved from

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

UNICEF. (2019). Access to Education for Non-Citizen and Marginalized Children in Malaysia. Kuala Lumpur: UNICEF Malaysia. Retrieved from <https://www.unicef.org/malaysia>

UNICEF Malaysia. (2021). Ensuring Inclusive Education for Migrant and Refugee Children. Retrieved from <https://www.unicef.org/malaysia>

U.S. Department of State. (2022). Country Reports on Human Rights Practices: Malaysia 2022. Washington, D.C.: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor.

Zainal Abidin, Z. (2021). Kebijakan Pendidikan untuk Anak Migran di Malaysia: Perspektif Hukum dan Implementasinya..